

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Perkembangan teknologi dan globalisasi di era sekarang, tidak heran jika sebuah kemajuan teknologi dan informasi tidak mengiming-imingkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam menyajikan informasi, juga tidak terkecuali pada pemerintahan. Kemudian, perkembangan teknologi dan informasi sudah membuat masyarakat ikut terhanyut didalamnya. Hal ini juga sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bisa dipisahkan, karena teknologi dan informasi merupakan salah satu penopang perkembangan manusia. Kini, teknologi dan informasi telah menjadi suatu kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, peran teknologi informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam meningkatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Faktanya, terdapat banyak inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah *E-Government*.

Menurut (Muliawaty & Hendryawan, 2020) *E-Government (Electronic Government)* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak dalam aspek *good governance* (masyarakat dan lembaga bisnis) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Strategi oleh konsep *E-Government* ini tertuju pada

pemanfaatan teknologi dan informasi. Nantinya ini bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan akses layanan untuk masyarakat. Di Indonesia, *e-Government* sendiri mempunyai arti khusus yaitu suatu kegiatan pemerintah yang dapat memajukan hubungan yang saling mendukung, harmonis, dan adil antara masyarakat, dunia usaha, dan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi dan situs web/internet (Wirawan, 2020). Ia juga menambahkan bahwa konsep *e-government* diterapkan dengan tujuan agar hubungan pemerintah dengan masyarakat dan dengan pelaku ekonomi dapat berlangsung secara efektif, efisien, ekonomis dan mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah harus mampu mengatur fungsi-fungsinya dalam negara agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dan menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman, hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki sistem dan pengelolaan *e-Government* itu sendiri sebagai solusinya.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan ibu kota nya adalah Yogyakarta. Kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Yogyakarta yaitu diantaranya Kabupaten gunung kidul, kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Bantul. Per-tahun 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.073.907 jiwa (*Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2023*). Dalam hal mempermudah pelayanan masyarakat maka Daerah Istimewa Yogyakarta membagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai Kota Pelajar, namun dengan terciptanya julukan tersebut tidak memungkinkan bahwa di Kota Yogyakarta tidak adanya kemiskinan dan penurunan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa, dengan angka kemiskinan di 11,49%. Penyebab provinsi DIY menjadi provinsi termiskin di pulau Jawa adalah permasalahan soal upah minimum yang rendah yang membuat daya beli masyarakatnya juga ikut rendah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan penurunan ekonomi.

Dampak pandemi covid-19 masih dirasakan dalam memengaruhi perekonomian masyarakat kota Yogyakarta. Konsekuensi dari adanya *lockdown* sepanjang tahun 2021 sangat berdampak pada harga kebutuhan pokok, permasalahan ketahanan pangan, kendala modal bagi UMKM, rendahnya suku bunga investasi, serta meningkatnya pengangguran tanpa disertai dengan lapangan kerja yang sesuai. Inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah pendirian layanan E-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Jasa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan sosial. E-Warong Kube jasa juga sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, serta memasarkan hasil produksi anggota KUBE. Kementerian Sosial (Kemensos) juga memperkenalkan inovasi terbaru ini dengan tujuan meningkatkan kualitas dan jumlah pelayanan bantuan sosial (Yohana et al., 2022).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu keluarga-keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan dan akan mendapatkan dana pada periode tertentu. PKH adalah suatu bentuk bantuan sosial yang diberikan dengan syarat kepada keluarga miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat PKH (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019). Sebagai suatu program bantuan sosial yang mengandalkan pemenuhan syarat, PKH memberikan kesempatan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang dapat diakses di lingkungan sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai digalakkan untuk mencakup individu penyandang disabilitas dan orang lanjut usia dengan tetap memperhatikan standar perlindungan sosial yang ditentukan oleh konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya yaitu:

- a. Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin.
- c. Mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin

Untuk menjadi Anggota KUBE Jasa diatur didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

- a. Peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya
- b. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
- c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif
- d. Memiliki potensi dan keterampilan

Kemudian, dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa keanggotaan KUBE Jasa dianggap berakhir apabila:

- a. Telah meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Pindah ke kecamatan lain
- d. Sakit permanen
- e. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya ukuran dasar atau kriteria dalam pembentukan E-Warung KUBE Jasa PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2016 mengenai Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan diantaranya:

- a. Bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa
- b. Pemilik rumah/tempat lain harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat E-Warung KUBE PKH
- c. Lokasi yang memiliki koneksi internet dan akses listrik
- d. Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial
- e. Melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai

Tujuan hadirnya program KUBE Jasa PKH ini adalah untuk membantu keluarga-keluarga kurang mampu dan mengentaskan kemiskinan disetiap daerah dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu menjadi lebih sejahtera dan meringankan beban belanja masyarakat miskin. Sebagai bagian dari tujuan tersebut diharapkan program E-warung KUBE Jasa PKH dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan bantuan sosial dengan lebih mudah, tidak dalam bentuk tunai tetapi menggunakan sistem pendukung perbankan. Serta adanya program E-warung KUBE Jasa PKH juga diharapkan dapat terciptanya transparansi agar tidak terjadinya penyelewengan hak dan masalah ekonomi dalam masyarakat. Apalagi masyarakat itu sendiri yang menjalankan program ini.

Sejak bulan Juni 2016, Kementerian Sosial (Kemensos) telah meluncurkan program E-Warong sebagai respons terhadap arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 kepada kabinetnya. Arahan tersebut mencakup beberapa poin, yaitu: 1) kebutuhan untuk mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif; 2) penyaluran seluruh bantuan sosial dan subsidi secara non-tunai melalui sistem perbankan untuk mempermudah pengawasan dan pemantauan, serta mengurangi potensi penyimpangan; dan 3) pentingnya mengintegrasikan penggunaan berbagai jenis kartu dalam penyaluran dana bantuan sosial menjadi satu kartu.

Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) merupakan transformasi dari bantuan sosial dalam bentuk uang tunai menjadi bantuan sosial non-tunai yang menggunakan platform digital. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan adanya E-Warong, diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam usaha mengatasi kemiskinan. Secara praktis, E-Warong berfungsi sebagai saluran distribusi untuk program bantuan pangan non-tunai (program sembako), yang lebih menitikberatkan pada layanan publik berbasis elektronik (e-service). Bantuan non-tunai ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan bahan pokok, E-warong ini bisa disebut sebagai agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara tetapi tetap diawasi oleh kementerian sosial. Bank-bank Negara tersebut diantaranya berupa BRI, BNI, mandiri, dan BTN.

Elektronik Warung Gotong Royong atau biasa disebut E-Warong menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa E-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur. Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan sosial disingkat dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Bantuan sosial ini disalurkan secara non tunai dari pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik dan uang elektronik tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-warong. Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki tujuan sebagaimana juga dicantumkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk:

- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi

- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat Bahan Pangan Non Tunai dalam memenuhi kebutuhan pangan

Adapun daftar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih aktif hingga kini yang ada di Kelurahan Wirogunan Yogyakarta , sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar KUBE Aktif di Kecamatan Wirogunan

No	Nama Kube	Kelurahan
1.	KUBE Sejahtera XII BNKT.01	Wirogunan
2.	KUBE Sejahtera XII BNKT.03	Wirogunan
3.	KUBE Sejahtera XII BNKT.05	Wirogunan
4.	KUBE Sejahtera XVII YKKT.036	Wirogunan
5.	KUBE Jasa e- WARONG	Wirogunan
6.	KUBE Dasa Karya	Wirogunan
7.	KUBE PKH XVI MG 1	Wirogunan
8.	KUBE PKH XVI MG 2	Wirogunan
9.	KUBE Sejahtera XIII YKKT 026	Wirogunan
10.	KUBE Sejahtera XIII YKKT 028	Wirogunan

Sumber: Pendamping KUBE Kelurahan Wirogunan, 2023

Selain itu dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE Jasa PKH di Kampung Surokarsan Kelurahan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdapat Kube yang tidak aktif lagi diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Daftar KUBE Tidak Aktif di Kelurahan Wirogunan

No	Nama Kube	Kecamatan
1.	KUBE Sejahtera XIII YKKT.030	Wirogunan

2.	KUBE Sejahtera XIII YKKT.033	Wirogunan
3.	KUBE Sejahtera XIII YKKT.035	Wirogunan

Sumber: Pendamping KUBE Kelurahan Wirogunan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat tiga KUBE PKH yang tidak aktif lagi di Kelurahan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kube PKH yang tidak aktif ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Sehingga mereka terdampak dan terpaksa menutup warung mereka.

Salah satu E-Warong Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kampung Surokarsan Kecamatan Wirogunan yang masih menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tetapi diterima secara tunai adalah KUBE Jasa E-Warong. Artinya Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan secara Tunai oleh pemerintah melewati kantor pos, tidak lagi melewati KUBE Jasa E-Warong. E-warong ini berbentuk layaknya warung yang menjual kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung Surokarsan. Selain itu, KUBE Jasa E-Warong ini juga melayani mengecek saldo bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pembayaran air, pembayaran Listrik, dan transfer-transfer lainnya. Yang membedakan KUBE Jasa E-Warong ini dengan E-Warong lainnya adalah KUBE Jasa E-Warong ini menyalurkan secara mandiri atau perseorangan, artinya bangunan yang ditempati adalah milik sendiri (tidak menyewa atau kontrak).

Sejak Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diterimakan secara tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengambil sangat berkurang dan yang mengambil

adalah Keluarga Penerima Manfaat yang mau saja. Hingga saat ini penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) masih terus berjalan di kampung Surokarsan, Kecamatan Wirogunan Derah Istimewa Yogyakarta. Kebanyakan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tidak membelanjakan uang tersebut ke E-Warong, sehingga banyak E-Warong yang terancam tutup apabila tidak sambil menjual kebutuhan pokok lainnya.

Dalam pelaksanaannya E-Warong memanfaatkan perangkat elektronik seperti Mini ATM/EDC, sementara pelaksanaan di KUBE dilakukan secara manual, mirip dengan pedagang umum. Sasaran dari layanan KUBE Jasa E-Warong ini mencakup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga masyarakat umum. Dikarenakan bentuk E-Warong KUBE ini adalah perseorangan/ mandiri, artinya bangunan yang ditempati adalah milik sendiri, tidak menyewa. KUBE Jasa E-Warong ini juga melayani KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jika ingin mengecek saldo. Keuntungan yang diperoleh dari E-Warong ini berasal dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bank yang bekerja sama seperti melayani transfer, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan keuntungan yang diperoleh KUBE bersifat konvensional.

Adanya perbedaan antara KUBE Jasa E-Warong ini dengan KUBE-KUBE lainnya yaitu terletak pada kegiatan rutin yang setiap bulan dilakukan oleh KUBE Jasa E-Warong. Kegiatan tersebut berupa Bakti Sosial untuk membantu masyarakat-masyarakat Surokarsan yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah namun realitas kehidupannya seharusnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Oleh

karena itu, KUBE Jasa E-Warong melakukan Bakti Sosial berupa pemberian sembako dan kebutuhan pokok untuk masyarakat Surokarsan yang data nya tidak tercantum dalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, KUBE Jasa E-Warong memberikan pelayanan yang sangat baik, ramah, dan perhatian kepada setiap *Customer* yang datang baik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun kepada Non-Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini menjadi salah satu kewajiban pelayanan yang harus ada pada setiap anggota KUBE. Fungsi dari ini agar masyarakat merasa terpuaskan, terbantu, dan memanfaatkan jasa KUBE Jasa E-Warong.

Selain permasalahan di atas, penulis juga menemukan permasalahan lain dilapangan yang didapatkan dari Pendamping KUBE di antara nya adalah:

1. Dana yang disalurkan sering mengalami keterlambatan pencairan, biasanya pencairan dana dilakukan rutin tiap bulannya namun sekarang mengalami keterlambatan 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan lamanya.
2. Kelurga Penerima Manfaat (KPM) tidak membelanjakan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) ke E-Warong

Alasan penelitian ini dilakukan yaitu dikarenakan sejak berakhirnya jabatan Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018 menjadi Ibu Tri Rismaharini (2020 – sekarang), dana yang disalurkan untuk E-Warong Kube Jasa mengalami permasalahan yaitu keterlambatan pencairan.

Kemudian dari alasan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait Efektivitas Kebijakan E-Warong Kube Jasa dari Teori yang telah peneliti rancang di Bab selanjutnya.

Dari Indikator yang ada pada kerangka teori yaitu teori Efektivitas Kebijakan yang mencakup indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dan teori Kesejahteraan ekonomi yang akan melihat kondisi materi (rumah dan bahan pangan) dan fisik (lingkungan) di lapangan. Dari indikator tersebut peneliti ingin mencari tahu indikator mana yang tidak digunakan atau tidak efektif pada realitas kondisi E-Warong Kube Jasa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Kebijakan E-Warong Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE): Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa Program Keluarga Harapan (PKH) di Surokarsan, Yogyakarta”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *Bagaimana Efektivitas Kebijakan E-Warong Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus KUBE Jasa PKH di Surokarsan Yogyakarta?*

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan dan masalah dalam Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan permasalahan dengan tepat agar lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan sumber informasi studi terdahulu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, serta sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran untuk peneliti selanjutnya dalam mengetahui Efektivitas Kebijakan E-Warong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi kelompok usaha bersama di Surokarsan Yogyakarta
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan dapat dijadikan sarana memperbaiki dan pengevaluasian Program e-Warong KUBE Jasa yang diterapkan di Kampung Surokarsan berdasarkan kendala-kendala yang ada.

c. Bagi masyarakat

Menumbuhkan semangat bagi masyarakat anggota KUBE dalam mengikuti pertemuan rutin dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan penelitian terdahulu, dan untuk menjadikan sebuah dasar penelitian ini, maka berikut dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Hanum & Suryawati, 2021)	Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kabupaten Sukoharjo (studi kasus di Kecamatan Mojolaban)	Dalam Proses implementasi program E-Warong ditemukan bahwa hasil yang diperoleh belum optimal. Proses tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Sosialisai, (2) Pendirian E-Warong dan KUBE, (3) Penyelenggaraan pengadaan barang ke E-Warong, (4) Monitoring dan evaluasi. Di antara ke empat tahap diatas, yang pelaksanaannya sudah patuh ialah tahap sosialisasi, tahap pengaturan penyediaan barang ke E-Warong KUBE, tahap monitoring dan evaluasi. Namun, pembentukan E-Warong dan KUBE masih menghadapi beberapa masalah seperti ketidakmerataan keuntungan bagi pengelola E-Warong KUBE.
2.	(Afringgo et al., 2021)	Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru	Efektivitas E-Warong sebagai alat untuk mengintegrasikan tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru dinilai cukup berhasil dalam sebagian besar aspek. Aspek-aspek tersebut melibatkan pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.
3.	(Amanda et al., 2022)	Komunikasi dan Sumber Daya Dalam Implementasi Program E-Warong KUBE PKH	Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan optimal. Komunikasi dilaksanakan secara efisien, dan terdapat koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Walaupun sumber daya manusia dan keuangan mencukupi, keahlian pelaku yang

			berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) masih terbatas, sehingga implementasi pengembangan E-Warong KUBE belum mencapai hasil maksimal.
4.	(Yohana et al., 2022)	Edukasi Pengelolaan Keuangan Bagi Pengurus E-Warong KUBE Jasa di Wilayah DKI Jakarta Barat	Pelatihan ini memberikan materi mengenai manajemen keuangan yang dapat meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen mereka dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, sehingga dapat memperkuat peran dan manfaat KUBE Jasa di lingkungan masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Barat.
5.	(Satrianto Alpon, 2020)	Pelatihan Pemasaran Produk dan Pembukuan Usaha Kecil Bagi Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa E-Warong Jaya Berjaya Kota Padang	Pelatihan calon wirausaha baru bidang produk kerajinan di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara kota Padang sudah berjalan optimal, ditandai dengan peserta memperoleh pengetahuan tentang pentingnya: (1) Pemasaran secara online, (2) Pembukuan usaha kecil dan, (3) Perhitungan harga pokok produksi.
6.	(Amalia, 2018)	Jaringan Sosial E-Warong KUBE dan PKH Dalam Hal Penanganan Kemiskinan Pada E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru	E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru dianggap berhasil mengubah kondisi beberapa pengurusnya dan berhasil mengembangkan usaha kelompok mereka ke arah yang lebih maju. <i>Social Network</i> E-Warong Cahaya Dini berperan dalam mengatasi kemiskinan dengan saling berbagi sumber daya, khususnya dalam hal keterampilan wirausaha, serta mendukung peluang pembelajaran atau pengembangan keterampilan untuk dunia usaha.

7.	(Anggraini et al., 2022)	Evaluasi Program E-Warong KUBE PKH Berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 8 tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu (studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu)	Dari segi Input, program E-Warong KUBE PKH belum optimal karena masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan program. Jika dilihat dari aspek proses, implementasi usaha E-Warong KUBE PKH belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017.
8.	(Juniarto & Laksmono, 2021)	Pemberdayaan Kelompok Pengurus E-Warong KUBE PKH Harapan Jaya Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Pemberdayaan E-Warong KUBE PKH Harapan Jaya Kelurahan Manggarai berjalan sesuai harapan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Komitmen pelaksana program yang bersedia dan memberikan layanan publik yang optimal dengan menerapkan <i>E-Government</i> . (2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan; (3) Adanya sumber daya manusia yang terlibat.
9.	(Arivina et al., 2018)	Pendampingan E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa Maju Jaya di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung	Penduduk Kelurahan Pematangwangi menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelatihan yang diterima, terutama terkait strategi keberhasilan UMKM dalam menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan. Permasalahan manajemen dan produksi yang dihadapi mengalami keterbatasan akses permodalan, belum ada pengelolaan keuangan, dan minimnya promosi.
10.	(Arisman Parhusip, 2020)a	Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Sunggal sudah berhasil.

		Melalui E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Sunggal Medan	Program KUBE terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan masyarakat kecamatan Sunggal. Kemudian selalu diadakannya gelar produk bulanan yang tujuannya untuk mempromosikan dan mengenalkan produk yang dihasilkan oleh masing-masing KUBE, meskipun masih ada beberapa KUBE yang terkendala dalam pemasaran dan bahan baku yang susah.
11.	(Zurina, Kustiawan, 2020)	Evaluasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Tanjungpinang Tahun 2020	Program E-Warong KUBE-PKH Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. karena status prasejahtera KPM yang masih sangat tinggi sehingga tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya program tersebut sebagaimana tertulis dalam Permensos nomor 25 tahun 2017 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM).
12.	(Banjarnahor et al., 2021)	Evaluasi Program Pengelolaan E-Warong di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Studi Pada E-Warong Tuah Sakti Kelurahan Tanjungpinang Timur)	Evaluasi ini menggunakan metode evaluasi model CIPP. Penilaian komponen ini menunjukkan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Komponen yang dimaksud adalah Komponen Konteks, masukan, perencanaan proses, dan komponen produk.
13.	(Komang & Sariningsih, 2018)	<i>Economic Empowerment Through Income Generating of E-Warong Kube Business at Cimahi City</i>	Pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan pendapatan para operator E-Warong KUBE di Kota Cimahi masih belum optimal. Hal ini di gambarkan dalam beberapa kategori diataranya: (1) Pelatihan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), belum terwujudnya variasi dan jenis usaha yang dikembangkan E-

			Warong KUBE dan masih terbatas dalam penyaluran BPNT saja, sumber keuangan E-Warong KUBE masih bersumber dari bantuan yang diberikan pemerintah, (2) faktor internal yaitu dinamika kelompok E-Warong yang masih rendah (3) Jiwa kewirausahaan masih rendah dan interaksi sosial masih belum maksimal.
14.	(Khairunnisa & Yadi, 2022)	Analisis Penerapan <i>E-Government</i> Pada Program Bantuan Non-Tunai di Aplikasi E-Warong Dengan Metode Swot di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Oki	Diperlukan upaya promosi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang memerlukan dukungan dari program E-Warong. Proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk mencegah kemungkinan masalah terutama dalam pelaksanaan program E-Warong.

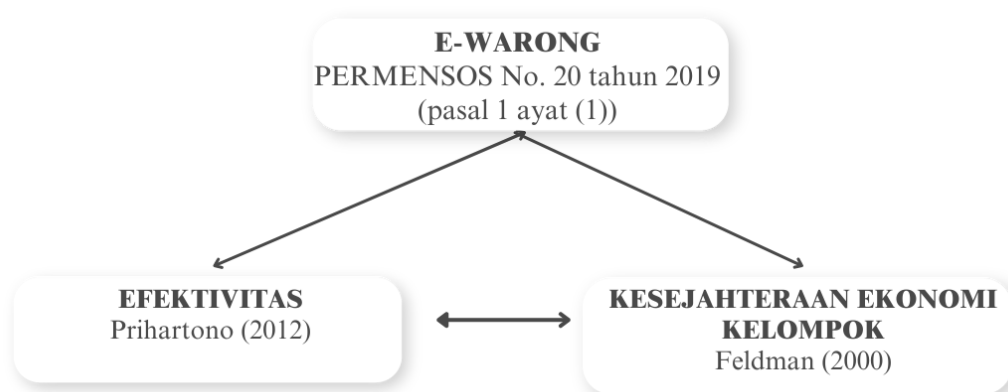
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas sama-sama membahas tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH. Namun ada beberapa perbedaan seperti pada penelitian pertama, ketujuh, kesebelas, dan keduabelas hanya membahas tentang pengevaluasian program E-Warong KUBE. Kemudian pada penelitian keempat dan kesembilan hanya membahas tentang edukasi pengelolaan keuangan bagi anggota E-Warong KUBE. Kemudian, pada penelitian kedua, keenam, kedelapan, kesepuluh, dan ketigabelas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas E-warong dalam meningkatkan perekonomian. Sedangkan pengembangan E-Warong dibahas dalam penelitian ketiga, kelima, keenam, dan keempatbelas. Hal ini menunjukkan bahwasannya penelitian bukan satu-satunya yang membahas tentang E-

Warong KUBE PKH. Belum ada peneliti yang secara khusus membahas tentang Efektivitas Kebijakan E-Warong Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus KUBE Jasa PKH di Surokarsan Yogyakarta.

F. KERANGKA TEORI

Gambar 1.1
Kerangka Teori



1) Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau *policy* yang berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi dampak pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Secara umum

kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan bagi rencana kerja, kepemimpinan, dan tindakan.

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: (1) proses pembuatan kebijakan, dimana merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan. (2) proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan. Dan (3) proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan.

Berkaitan dengan defeni Kebijakan, berikut beberapa definisi yang ada mengenai Kebijakan, diantaranya:

1. Carl Frenrich

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Manongga, 2021).

2. James E. Anderson

Kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu (Mahluddin, 2019).

3. Suharno (2010: 11)

Kebijakan sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Hidayah, 2019).

4. William N. Dunn (2003: 132)

Kebijakan Publik merupakan pola kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Mamahit et al., 2021).

Berdasarkan uraian dari definisi-definisi Kebijakan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan merupakan serangkaian tindakan tertentu yang mengarah pada seseorang, kelompok maupun pemerintah untuk memecahkan suatu masalah dan tujuan tertentu.

b. Level Kebijakan

Kebijakan ekonomi merupakan peraturan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Secara umum level kebijakan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sebagaimana disebutkan oleh (Khusen, 2019), diantaranya:

1. Kebijakan Ekonomi Mikro

Yaitu kebijakan pemerintah yang dibuat untuk seluruh perusahaan dengan berbagai jenis kegiatan dari seluruh perusahaan yang ada. Dalam dunia pemerintahan,

pemerintah pusat dan atau kementerian merupakan posisi tertinggi dalam pemerintahan.

2. Kebijakan Ekonomi Meso

Yaitu bentuk kebijakan ekonomi yang diperuntukkan hanya diwilayah dan sektor-sektor tertentu. Kebijakan ekonomi Meso dapat pula dibedakan menjadi dua, diantaranya:

a. Dalam arti sektoral

Dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang sifatnya khusus pada sektor-sektor tertentu dan kebijakan tersebut tidak bisa dipergunakan ke beberapa pihak secara umum namun sifatnya khusus terhadap sektor-sektor tertentu.

b. Dalam arti Regional

Dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang diarahkan atau dikhususkan pada wilayah tertentu saja.

3. Kebijakan Ekonomi Makro

Yaitu bentuk kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan segala aspek kegiatan perekonomian pada tingkat nasional (agregat). Kebijakan Makro ini lebih efektif jika dibandingkan dengan kebijakan mikro dan meso.

2) Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer

mendefinisikan sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Rosalina, 2012). Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian dan kemampuan. Efektivitas merupakan faktor mendasar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam suatu organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang tepat atau pemilihan tujuan yang tepat diantara sejumlah alternatif atau pemilihan metode dan identifikasi pilihan diantara beberapa alternatif. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Putri, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Secara umum Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka akan semakin efisien proses kerja unit organisasi tersebut.

Menurut Gibson, Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) dalam (Maisun, 2020) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Upaya untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dapat dilakukan

melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan signifikan dalam bentuk organisasi dan manajemen.

Menurut Gibson dkk (2000) terdapat dua pendekatan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi yaitu pendekatan tujuan (*the goal approach*) dan pendekatan teori sistem (*the system theory approach*). Pendekatan teori tujuan digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan, pendekatan teori sistem dipandang sebagai unsur yang paling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya (Vicky et al., 2018). Dapat dikatakan, jika suatu organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Berkaitan dengan defeni Efektivitas, berikut beberapa definisi yang ada mengenai Efektivitas, diantaranya:

1. H. Emerson

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan maksud mengetahui suatu keberhasilan atau tepat guna (Daniarsyah, 2019).

2. Sedarmayanti (2009: 59)

Konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Nurul Najidah dan Hesti Lestari, 2019).

3. Sutrisno (2010)

Efektivitas merupakan penilaian yang diukur dengan melihat sejauhmana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

4. The Lian Gie dalam Halim (2004: 167)

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi akibat yang diinginkan bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan yang memang diinginkannya maka orang tersebut dikatakan efektif apabila orang tersebut menimbulkan akibat atau mempunyai keinginan sebagaimana yang dikehendakinya.

5. Prihartono (2012: 37)

Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran dimaksud yaitu keadaan atau kondisi yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan teori Kebijakan yang berkaitan dengan Teori Efektivitas menurut Prihartono (2012: 37).

b. Kriteria Ukuran Efektivitas

Sutrisno (2010: 149) menjelaskan terdapat beberapa kriteria untuk mengukur tingkat Efektivitas diantaranya:

1. Produksi

Produksi merupakan kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk menghasilkan beberapa keluaran yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada perbandingan antara input dan output.

3. Kepuasan

Kepuasan adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa berhasil suatu organisasi dalam memenuhi keinginan masyarakat.

4. Keunggulan

Keunggulan adalah tingkat kemampuan dalam mengalami perubahan baik secara internal maupun eksternal.

5. Pengembangan

Pengembangan adalah parameter keterampilan organisasi untuk menjadikannya lebih bertanggung jawab untuk menjalankan keinginan masyarakat.

c. Indikator-indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno (2010) terdapat indikator-indikator Efektivitas di antaranya yaitu:

1. Pemahaman program

Dalam aspek ini yang dilihat adalah sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap kegiatan program

2. Tepat sasaran

Ditinjau dari pencapaian apa yang diinginkan

3. Tepat waktu

Dilihat dari sejauhmana program dapat mempengaruhi penggunaan waktu selama penyelenggaraan pelayanan

4. Tercapainya tujuan

Dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dari program yang telah dilaksanakan

5. Perubahan nyata

Dinilai berdasarkan sejauhmana program mampu menghasilkan efek, dampak, dan perubahan nyata bagi masyarakat

d. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Richard M Streers (1985:209) menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, diantaranya:

1. Karakteristik Organisasi

a. Struktur

- 1) Departementalisasi
- 2) Spesialisasi
- 3) Formulasi
- 4) Rentang kendali
- 5) Besarnya organisasi

b. Teknologi

- 1) Besarnya unit kerja
- 2) Operasi
- 3) Bahan
- 4) Pengetahuan

2. Karakteristik pekerja

a. Keterkaitan pada organisasi

- b. Ketertarikan
 - c. Kemantapan kerja
 - d. Keterikatan
3. Prestasi kerja
- a. Motivasi tujuan dan keterbukaan
 - b. Kemampuan
 - c. Kejelasan peran
4. Karakteristik Lingkungan
- a. Ekstern
 - 1) Kekompakan
 - 2) Kestabilan
 - 3) Ketidakstabilan
 - b. Intern
 - 1) Orientasi pada karya
 - 2) Pekerja sentries
 - 3) Orientasi pada imbalan hukuman
 - 4) Keamanan versus resiko
 - 5) Keterbukaan versus pertahanan
5. Kebijakan dan praktek manajemen
- a. Penyusunan tujuan strategis
 - b. Pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya
 - c. Penciptaan lingkungan prestasi

- d. Proses komunikasi
- e. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
- f. Inovasi dan adaptasi organisasi

e. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris dan merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah sarana untuk menjalankan suatu tindakan yang menghasilkan konsekuensi terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Implementasi yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut Mazmanian dan Sebastier (Sutojo, 2015: 3) menyatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan-kebijakan dasar yang berupa undang-undang dan dapat pula berupa peraturan, keputusan-keputusan penting atau berupa keputusan Badan Peradilan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pengambilan keputusan penting dalam organisasi namun berdasarkan dampaknya. Secara etimologis “kebijakan” merupakan terjemahan dari

kata “*policy*”. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan. Menurut Irfan Islamy (2000: 17) kebijakan merupakan serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Leo Agustino (2014: 139) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun juga dalam bentuk keputusan-keputusan penting atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan beradil. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan erat dengan sejauh mana tujuan kebijakan yang diharapkan tercapai. Kemudian, menurut Hasbullah (2015) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses politik yang berlangsung dalam tahapan-tahapan perencanaan kebijakan politik, dimana aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pengambilan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan segmen yang saling bergantung (Elih, 2020).

Ditambahkan pula oleh Budi Winarno (2018: 146-147) yang menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu serta dalam konteks upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan, besar dan kecil, yang ditentukan oleh keputusan politik yang diambil oleh lembaga publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Choiriyah, 2018). Kemudian, menurut Solihin Abdul Wahab (2008: 65) Implementasi merupakan pemahaman apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan

efektif. Hal ini yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan, khususnya kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijakan negara maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat (Entjaurau et al., 2021).

Riant (2012: 707-710) menyatakan bahwa ada lima ‘tepat’ yang harus dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dilakukan dengan mengukur sejauh mana kebijakan yang ada mencakup solusi yang efektif untuk masalah yang akan diselesaikan. Pertimbangan mencakup apakah kebijakan telah dirumuskan sesuai dengan sifat masalah yang dihadapi dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan misi kelembagaannya dan sesuai dengan karakteristik kebijakan.

2. Tepat Pelaksananya

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementator yakni pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/ swasta, atau implementasi kebijakan yang memiliki sifat monopoli.

3. Tepat Target

Apakah target sesuai dengan perencanaan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target bersedia melakukan intervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut merupakan hal baru atau merupakan pembaruan dari implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan kebijakan internal yang berkaitan dengan interaksi antara pengambil kebijakan dan pelaksana serta lembaga terkait lainnya. Dan lingkungan politik eksternal berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan implementasinya.

5. Tepat Proses

Terdapat tiga proses diantaranya pertama *Policy Acceptance*, masyarakat memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang telah diselesaikan. Kedua *Policy Adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus diselesaikan. Ketiga *Strategic Readiness*, masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau berpartisipasi dalam kebijakan tersebut dan para pejabat bersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Wahyu, S. (2010) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan berbagai kegiatan positif. Kegiatan positif tersebut dapat berupa kegiatan pelatihan, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan dan kegiatan lainnya. Keberadaan kelompok atau organisasi masyarakat diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing di berbagai bidang. Selain itu, “tujuan akhir KUBE adalah untuk meningkatkan tingkat perlindungan sosial keluarga” (Paulu, 2022).

Menurut Khatib Pahlawan Kayo (2008:15) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga-warga/ keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang/ keluarga-keluarga miskin (prasejahtera) yang menerima pelayanan social melalui kegiatan prosesos (Sah, 2022).

b. Kriteria pembentukan KUBE

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama, terdapat kriteria pembentukan KUBE diantaranya:

1. KUBE didirikan dengan syarar-syarat tertentu:
 - a. Memiliki potensi, motivasi dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama
 - b. memiliki jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan yang berada di kecamatan yang sama
 - c. memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar, modal, dan usaha
2. KUBE memiliki anggota minimal 5 (lima) kepala keluarga dan maksimal 15 (lima belas) kepala keluarga
3. Struktur organisasi KUBE terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
4. Pengurusan KUBE dilakukan berdasarkan kesepakatan atau keputusan musyawarah anggota kelompok

c. Indikator-indikator keberhasilan bantuan KUBE

Menurut Kemensos (1994) terdapat beberapa indikator keberhasilan bantuan KUBE diantaranya:

1. Kondisi kesejahteraan sosial dalam Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara menyeluruh
2. Mengembangkan koperasi kelompok
3. Mengembangkan usaha ekonomi berbasis kelompok
4. Kontribusi Kesejahteraan Sosial (IKS) atau Sumbangan Sosial Wajib (SSW) dan perkembangan gotong royong
5. Menyelenggarakan tabungan dan tabanas
6. Menjalankan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan struktur organisasi sosial.
7. Ikutserta Keluarga Binaan Sosial (KBS) pada program Keluarga Berencana (KB), posyandu dan wajib belajar
8. Berpartisipasi atau tidaknya dalam kegiatan karang taruna
9. Dampak proyek bantuan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.

4) Kesejahteraan Ekonomi Kelompok

a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Kelompok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan adalah keadaan dimana kondisi dinyatakan aman, sentosa, makmur sehingga tercapai adanya keselamatan dan ketentraman. Sedangkan Secara umum ekonomi kesejahteraan merupakan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam perekonomian. Ekonomi kesejahteraan sangat bergantung pada asumsi-asumsi tertentu tentang bagaimana kesejahteraan dapat didefinisikan, diukur, dan dibandingkan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut perspektif

masyarakat modern, kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan dasar seseorang dapat tercukupi, termasuk kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, peluang untuk melanjutkan pendidikan, dan kesempatan memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan status sosial yang diakui oleh masyarakat lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang layak agar dapat berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya. Kemudian, menurut Garda Maeswara dalam (Yanu, 2022) menyebutkan Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat merasa nyaman karena kebutuhan fisik dan psikologisnya terpenuhi. Aspek kesejahteraan fisik mencakup kebutuhan dasar ekonomi sosial, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Sementara itu, aspek kesejahteraan psikologis melibatkan dimensi emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat

Terkait dengan definisi Kesejahteraan Ekonomi, berikut beberapa definisi yang ada mengenai Kesejahteraan Ekonomi, diantaranya

1) Feldman (2000)

Ekonomi kesejahteraan merupakan upaya memulihkan hubungan antara pasar yang berdaya saing secara optimal dari sebuah kelompok hingga keberlangsungan pasar menjadi sempurna.

2) Suud (2006:9)

Kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan peningkatan perekonomian melalui unit-unit usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sektor perekonomian (Darmawan & Rismawati, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan teori Kesejahteraan Ekonomi menurut Feldman (2000).

b. Aspek Kesejahteraan Ekonomi Kelompok

Menurut Kolle (1974) kesejahteraan ekonomi dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, diantaranya:

1. Melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas tempat tinggal, bahan pangan, pakaian, dan sebagainya
2. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Melihat kualitas hidup dari perspektif mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Melihat kualitas hidup dari perspektif spiritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan sejenisnya

c. Indikator Kesejahteraan

Dalam mengukur tercapai tidaknya pembangunan disuatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan dan akan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dalam

(Sugiharto, 2007) Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari gaji dari pekerjaan, gaji dari properti seperti sewa, bunga dan keuntungan.

2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga

Konsumsi atau pengeluaran keluarga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga yang benar-benar digunakan untuk dikonsumsi dan digunakan.

3. Keadaan dan fasilitas tempat tinggal

Perumahan merupakan kebutuhan manusia yang memiliki peran penting dalam melindungi manusia dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas orang di masa depan. Fasilitas tempat tinggal juga menjadi tolak ukur seseorang tersebut sejahtera atau tidaknya. Fasilitas tempat tinggal mengacu pada kemudahan dan pelayanan yang tersedia di suatu tempat tinggal atau bangunan.

4. Kesehatan

Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui angka harapan hidup, mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya atas pengobatan yang diperlukan.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dari setiap penduduk untuk mengembangkan dirinya melalui pembelajaran. Kualitas Pendidikan dapat dinilai melalui beberapa

parameter seperti tingkat kelulusan, tingkat melek huruf, tingkat putus sekolah, dan tingkat partisipasi sekolah.

6. Kependudukan

Penduduk merujuk kepada individu atau kelompok orang yang tinggal dan mendiami sebagian atau seluruh bangunan secara umum. Kependudukan diukur melalui anggota rumah tangga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka beban ketergantungan.

Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dengan melihat kriteria sebagai berikut: (1) Agama, (2) Sandang, pangan, papan, (3) Kesehatan, (4) Pendidikan, (5) Keluarga berencana, (6) Tabungan, (7) Interaksi dalam keluarga dan lingkungan, (8) Informasi, dan (9) Peranan masyarakat. Tingkat kesejahteraan ini diukur dengan melihat kriteria-kriteria yang telah disebutkan. Semakin seseorang tersebut termasuk dalam kriteria, maka semakin dekat dikategorikan sejahtera.

d. Unsur-unsur Kesejahteraan

Menurut (Suardi, 2021) terdapat beberapa unsur-unsur kesejahteraan, diantaranya yaitu: 1) kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. 2) tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. 3) distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil

pembangunan secara adil dan merata. 4) menjamin kebebasan individu. 5) kesamaan hak dan peluang. 6) bekerjasama dan keadilan

Pengukuran Kesejahteraan masyarakat indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh (Cahyadi, 2017) meliputi: 1) konsumsi makanan, 2) tingkat pendidikan, 3) akses internet, 4) konsumsi non-makanan tahunan, 5) konsumsi non-makanan bulanan, dan 6) tingkat kesehatan.

e. Kesejahteraan Ekonomi Kelompok Usaha

Kesejahteraan ekonomi kelompok usaha merujuk pada kondisi keberhasilan ekonomi suatu kelompok usaha yang dijalankan secara bersama-sama oleh sekelompok individu atau anggota. Kesejahteraan ekonomi mencakup sejumlah faktor yang mencerminkan kesejahteraan atau keberhasilan usaha kelompok tersebut. Faktor-faktor yang mencerminkan kesejahteraan atau keberhasilan ekonomi bagi kelompok usaha bersama sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Subing, 2016) diantaranya:

1. Regulasi dan sistem organisasi

Adanya sistem organisasi yang baik dan jelas maka kegiatan dan proses pengambilan keputusan akan semakin baik pula, termasuk pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab.

2. Kualitas kelembagaan

Kualitas kelembagaan suatu kelompok usaha mengacu pada sejauh mana struktur, proses, dan mekanisme kelembagaan suatu kelompok usaha dapat mendukung tujuan dan keberlanjutan usaha.

3. Keterlibatan dan partisipasi anggota

Tingkat partisipasi yang tinggi dan keterlibatan aktif anggota dalam menjalankan usaha bersama dan pengambilan keputusan. Semakin banyak anggota yang terlibat maka semakin besar peluang keberhasilan kelompok usaha tersebut.

4. Kemampuan modal ekonomi

Kemampuan modal ekonomi melibatkan pencapaian tujuan ekonomi yang diinginkan seperti peningkatan pendapatan, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

5. Pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan mendukung pengembangan kelompok dalam hal manajemen bisnis dan keuangan yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usaha

6. Jiwa kewirausahaan

Semangat, sikap dan keterampilan merupakan bentuk jiwa kewirausahaan yang mendukung proses berwirausaha dalam suatu kelompok. Dalam hal ini seorang wirausahawan memiliki kemampuan untuk melihat peluang, pengambilan resiko, mengembangkan ide dan berinovasi untuk mencapai tujuan bersama.

7. Strategi kemitraan

Dalam hal ini strategi kemitraan digunakan oleh sekelompok usaha untuk menjalin dan memperkuat hubungan kerjasama dengan mitra-mitra eksternal maupun internal untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan yang dimaksud dapat melibatkan perubahan-perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

G. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Secara umum Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka akan semakin efisien proses kerja unit organisasi tersebut.

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Secara umum kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan bagi rencana kerja, kepemimpinan, dan tindakan.

3. E-Warong KUBE Jasa

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengenai Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan menyebutkan definisi E-Warong KUBE Jasa PKH ialah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa yang berfungsi sebagai saluran untuk penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk bahan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik. Selain itu, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan mendukung pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota KUBE (Anggleni, 2018). KUBE merupakan sarana pemberdayaan ekonomi

masyarakat, khususnya menciptakan kegiatan sosial ekonomi bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Melalui kelompok usaha bersama ini diharapkan dapat memperbaiki ekonomi, dan menciptakan keharmonisan antar masyarakat. Selain itu, diharapkan KUBE juga dapat memenuhi kebutuhan individu masing-masing keluarga dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan.

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (Nurul Najidah dan Hesti Lestari, 2019).

5. Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan yang aman, damai, tentram, dan bebas dari gangguan (Iganingrat & Eva, 2021). Sedangkan ilmu ekonomi sebagaimana disebutkan oleh (Nur Solihat & Arnasik, 2018) yang dikutip dalam Samuelson (1992:4) bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan berbagai produk dan kemudian mendistribusikannya ke berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah kemajuan perubahan dan

keadaan yang sifatnya berubah menjadi lebih baik ke arah positif yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi rumah tangga.

6. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (Yeni, 2021).

H. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan arah penelitian maka dilakukan pendefinisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan E-Warong Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus KUBE Jasa PKH di Surokarsan Yogyakarta.

Berdasarkan teori Kebijakan yang berkaitan dengan Teori Efektivitas yang digunakan oleh penulis yaitu teori Efektivitas yang dikembangkan oleh **Prihartono (2012: 37)** dan indikator yang dituliskan oleh **Riant (2012: 707-710)**. Serta Teori Kesejahteraan Ekonomi yang dikembangkan oleh **Feldman (2000)** dan indikator yang dituliskan oleh **Kolle (1974)**. Berikut variabel dan indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

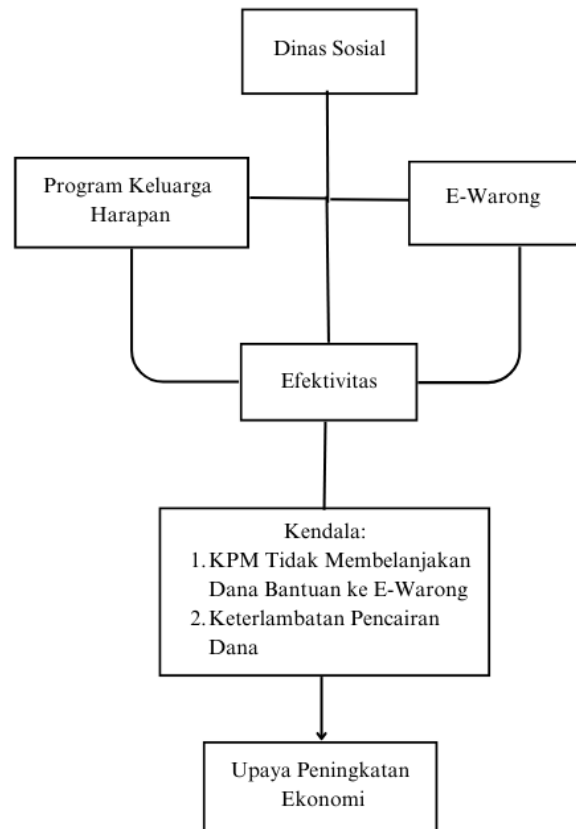
No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Efektivitas Kebijakan Program E-Warong KUBE Jasa PKH	Tepat Kebijakan	1. Bagaimana strategi pemerintah dalam menilai kebijakan dalam peningkatan ekonomi KUBE? 2. Bagaimana pemerintah menilai keberhasilan kebijakan program E-Warong?
		Tepat Pelaksananya	1. Apakah ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dapat diidentifikasi? 2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan?
		Tepat Target	Sejauh apa ketepatan sasaran program E-Warong untuk PKH
		Tepat Lingkungan	Apakah berdirinya KUBE Jasa E-Warong dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar?
		Tepat Proses	1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan KUBE? 2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan kebijakan KUBE?
2.	Peningkatan Ekonomi Program E-Warong Kube Jasa	Materi (rumah, bahan pangan)	Bagaimana dampak peningkatan ekonomi dari program E-Warong Kube Jasa terkait kondisi Rumah dan Bahan pangan yang tersedia di Surokarsan
		Fisik (Lingkungan)	Bagaimana kondisi lingkungan yang dipengaruhi dari hasil program E-Warong Kube Jasa

I. KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan penelitian ini penulis menyusun pengembangan kerangka berpikir, sebagai berikut

Gambar 1.2

Kerangka Berpikir



J. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.

Pengertian dari metode deskriptif menurut (Arikunto, 2005) dalam (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) bahwa: “penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi mengenai status suatu gejala pada saat penelitian dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap dan mendetail tentang variabel, gejala, atau keadaan tertentu tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Meskipun terkadang penelitian deskriptif dapat mencoba membuktikan dugaan

tertentu, namun umumnya tujuannya lebih kepada menjelaskan "apa adanya" terkait suatu fenomena. Dengan kata lain, penelitian deskriptif umumnya tidak diarahkan untuk menguji hipotesis secara khusus.

Sedangkan pengertian kualitatif menurut (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77) dalam (Fadli, 2021) adalah: “Studi tentang pemahaman fenomena manusia atau sosial dengan melaporkan pandangan rinci yang diperoleh dari informan dan menciptakan gambaran lengkap yang dapat disajikan dengan kata-kata”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan di KUBE Jasa E-Warong kampung Surokarsan, Kecamatan Wirogunan. Alasannya dikarenakan masih adanya masalah keterlambatan dalam pencairan dana dan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak membelanjakan Uang Bantuan ke E-Warong.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan di lapangan, termasuk dengan hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih. Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kasus yang sedang diteliti. Adapun data primer didapati dari Pemilik E-Warong KUBE Jasa, pendamping KUBE PKH, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus kepada kepala Bidang Jaminan Sosial dan Lurah Kelurahan Wirogunan.

b. Data sekunder

Merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber referensi yang terkait dengan objek penelitian. Ini berarti data yang dikumpulkan sudah ada sebelumnya dan tidak diperoleh melalui penelitian langsung pada objek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, arsip, atau data dokumenter. Dalam konteks ini, data sekunder mengacu pada informasi tentang E-warong dan peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Primer

1. Teknik observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap partisipan atau objek yang terlibat dalam fenomena penelitian (Ardiansyah, 2023).

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang berada di Surokarsan Yogyakarta yaitu E-Warong KUBE Jasa untuk mencari, memahami, menganalisis informasi dan data-data terkait Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan, dan melihat hasil dari peningkatan ekonomi dari Pemilik E-Warong Kube Jasa.

2. Teknik wawancara

Menurut (Moleong, 2011, p. 186) dalam (Linarwati et al., 2016) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung kepada subjek dan objek penelitian yaitu Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus Kepala Bidang Jaminan Sosial, Lurah Kelurahan Wirogunan, Pemilik E-Warong KUBE Jasa, dan pendamping Kube PKH. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh sumber informasi terkait.

Tabel 1.4
Data Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Informan
Efektivitas Kebijakan Program E-Warong KUBE Jasa PKH	Tepat Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi pemerintah dalam menilai kebijakan dalam peningkatan ekonomi KUBE? 2. Bagaimana pemerintah menilai keberhasilan kebijakan program E-Warong? 	Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
	Tepat Pelaksananya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dapat diidentifikasi? 2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan? 	Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
	Tepat Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana target KUBE dalam 	Pendamping KUBE PKH dan

		<p>pemulihan perekonomian masyarakat di Surokarsan?</p> <p>2. Sejauh apa ketepatan target program E-Warong untuk PKH?</p> <p>3. Bagaimana strategi peningkatan usaha yang dijalankan oleh KUBE sehingga dapat bertahan hingga saat ini?</p> <p>4. Bagaimana meningkatkan kepedulian sosial diantara pemilik KUBE dengan masyarakat sekitar.</p>	Pemilik E-Warong KUBE Jasa
	Tepat Lingkungan	Apakah berdirinya KUBE Jasa E-Warong dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar?	Pemilik E-Warong KUBE Jasa
	Tepat Proses	1. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan kebijakan KUBE?	Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta
		2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan KUBE?	Pendamping KUBE PKH
Peningkatan Ekonomi Program E-Warong Kube Jasa	Materi (rumah, bahan pangan)	Bagaimana dampak peningkatan ekonomi dari program E-Warong Kube Jasa terkait kondisi Rumah dan Bahan pangan yang tersedia di Surokarsan	Pendamping KUBE PKH
	Fisik (Lingkungan)	Bagaimana kondisi lingkungan yang dipengaruhi dari hasil	Pendamping KUBE PKH

		program E-Warong Kube Jasa	
--	--	-------------------------------	--

b. Sekunder

1. Teknik Dokumentasi

Menurut (Nilamsari, 2014) Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Yaitu terkait Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama: Studi Kasus KUBE Jasa PKH di Surokarsan Yogyakarta. Pada penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi secara pribadi berupa foto atau gambar kegiatan E-Warong dan kondisi E-Warong, serta proses penelitian seperti rekaman suara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu dengan mengelompokkan data kedalam masing-masing kategori, dan memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis data

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan. Setelah itu data akan dikelompokkan dalam masing-masing kategori, serta memilih bagian yang penting saja untuk dipelajari.

b. Penyajian data

Pada tahap ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan data yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti mampu untuk menjawab rumusan masalah, menemukan temuan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dan diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih terperinci terkait rumusan masalah dalam penelitian tentang Efektivitas Kebijakan E-Warong KUBE Jasa PKH sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama di Surokarsan.